

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA *COMMUNITY*  
*BASE TOURISM (CBT)* DI TAMAN GHANJARAN**  
(Studi di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)

Nyimas Nadya Izana <sup>1)\*</sup>, Anik Susanti <sup>1)</sup>,

<sup>1</sup>Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya

\*Email Korespondensi: [nyimasnadya@ub.ac.id](mailto:nyimasnadya@ub.ac.id)

**Abstract**

*Tourism development based on community based tourism (CBT) is no longer a new thing for tourism developers. To attract local residents, the developer proposed a CBT concept. Whereas in fact, the tourism development carried out is not fully pro-local. Even detrimental to nature and local residents. Ghanjaran Park breaks down the stigma that is the bad loophole in CBT. Ghanjaran Park is home to local community groups that participate in the development process. One of them is the KUB group which is a forum for residents to participate in the form of stock investment. KUB is a group managed by residents and for residents. KUB is the only partner of Ketapanrame BUMDes in managing Ghanjaran Park. Nearly half of the residents own shares in KUB, and the investments made by residents are accounted for in the form of a vehicle for games. This study aims to describe community participation in group-based tourism management of Ghanjaran Park in Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques interviews, observation and review of secondary documents. The result of community participation in the management of Ghanjaran Park from buying shares and managing shares.*

**Key Word :** *Community Base Tourism (CBT), Participation, Tourism Management*

**Abstrak**

Pengembangan wisata berbasis *community based tourism (CBT)* tidak lagi menjadi hal baru bagi pengembang wisata. Untuk menarik warga lokal, pengembang mengajukan konsep CBT. Padahal sejatinya, pengembangan wisata yang dilakukan tidak sepenuhnya berpihak kepada warga lokal. Bahkan merugikan alam dan warga setempat. Taman Ghanjaran mendobrak stigma yang menjadi celah buruk dalam CBT. Taman Ghanjaran menaungi kelompok-kelompok masyarakat lokal yang ikut berpartisipasi dalam proses pengembangannya. Salah satunya adalah kelompok KUB yang menjadi wadah bagi warga yang ikut berpartisipasi dalam bentuk investasi saham. KUB merupakan kelompok yang diolah warga dan untuk warga. KUB menjadi satu-satunya mitra BUMDes Ketapanrame dalam pengelolaan Taman Ghanjaran. Hampir setengah warga menjadi pemilik saham dalam KUB, dan investasi yang dilakukan oleh warga dipertanggungjawabkan dalam bentuk wahana permainan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat pada pengelolaan wisata Taman Ghanjaran berbasis kelompok di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan telaah dokumen sekunder. Hasil adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Ghanjaran dari pembelian saham dan pengelolaan saham.

**Kata Kunci :** *Community Base Tourism (CBT), Partisipasi, Pengelolaan Wisata*

### A. Pendahuluan

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang mengalami perkembangan yang sangat cepat. Indonesia mempunyai sektor pariwisata terus mengalami pengembangan dan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 7 juta wisatawan dari mancanegara dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 bertambah sebanyak 10,5 juta wisatawan mancanegara (Pakpahan, 2018). Angka tersebut diperkirakan akan semakin mengalami peningkatan mengingat semakin besarnya kebutuhan manusia akan hiburan. Oleh karena itu, banyak pengembang yang menginvestasikan uangnya untuk membangun wisata-wisata baru. Wilayah sasaran pengembangan wisata umumnya berada di pedesaan-pedesaan yang memiliki suasana alam yang masih asri. Sehingga pengembangan yang dibutuhkan tidak terlalu membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu, banyak wilayah di desa-desa yang diubah menjadi wisata demi memenuhi kebutuhan *refreshing* tersebut. Sayangnya, pengembangan wisata tersebut tidak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat dan cenderung mengabaikan kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut. Maka disini, konsep CBT diperlukan untuk memihak masyarakat dan kearifan lokal ditengah budaya pengembangan wisata yang semakin tak mengenal batas.

Lahirnya pemikiran mengenai *Community Based Tourisme* merupakan kritik dari pembangunan pariwisata yang mengabaikan dan kurang memberikan keuntungan kepada kelompok lokal. Pengembangan pariwisata seharusnya dibarengi dengan pengembangan kelompok lokal yang berada di sekitar destinasi wisata baik secara ekonomi, sosial maupun

budaya. Oleh karena itu, lahirlah pemikiran mengenai pengembangan pariwisata yang lebih berpihak kepada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *community based tourism* (CBT). Dalam Suansri (2003) CBT merupakan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya. Dikelola dan dimiliki oleh kelompok, untuk kelompok, dengan tujuan memungkinkan pengunjung untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang kelompok dan cara hidup lokal (Suansri, 2003).

Dari pengertian CBT yang dikemukakan oleh Suansri, dapat disimpulkan bahwa CBT bukan sekedar bisnis pariwisata yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor. Melainkan lebih mementingkan dampak pariwisata terhadap masyarakat dan sumber daya lingkungan yang berada di sekitar destinasi wisata. CBT muncul dari strategi pengembangan masyarakat, yang mana memanfaatkan sektor pariwisata untuk memperkuat ikatan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan melalui pelatihan organisasi (kelompok) dengan menyeimbangkan antara pengelolaan sumber daya pariwisata dan partisipasi masyarakat. Meski begitu, CBT masih jauh dari solusi sempurna atas permasalahan kelompok, karena apabila tidak diolah dengan baik dan tidak adanya pengawasan, CBT dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian terkait masyarakat yang dipilih untuk mengembangkan dan menjalankan CBT ini. Lebih penting lagi, masyarakat harus memiliki kekuatan untuk mengubah atau menanggulangi CBT, jika CBT tumbuh melebihi kapasitas pengelolaan masyarakat atau

membawa dampak negatif yang tidak dapat dikelola.

Prinsip-prinsip yang tercantum di bawah ini menyajikan konsep CBT, dan cara host (masyarakat lokal) dapat menggunakan pariwisata sebagai alat untuk pengembangan masyarakat (Suansri, 2003). Maka CBT harus:

1. Mengenal, mendukung dan mempromosikan kepemilikan kelompok atas pariwisata
2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal dalam setiap aspek
3. Mempromosikan kebanggaan kelompok
4. Meningkatkan kualitas hidup
5. Memastikan kelestarian lingkungan
6. Melestarikan karakter dan budaya unik daerah setempat
7. Pembelajaran lintas budaya yang lebih cepat
8. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia
9. Mendistribusikan manfaat secara adil di antara anggota kelompok
10. Sebagian pendapatan dikontribusikan untuk proyek kelompok

Menurut Suansri (2003) sebelum mengembangkan CBT yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, perlu dipersiapkan dan ditingkatkan kapasitas masyarakat setempat (*host*) untuk mengelola pariwisata. Pemasaran CBT juga harus mempromosikan kesadaran publik tentang perbedaan antara CBT dan pariwisata massal, mendidik masyarakat untuk menyadari pentingnya CBT sebagai alat kelompok untuk konservasi sumber daya dan pelestarian budaya. Ini akan menarik wisatawan yang sesuai untuk CBT.

Pariwisata berbasis kelompok sendiri merupakan konsep

pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dan menjaga kearifan lokal tetap terjaga sebagaimana mestinya. Maka dari itu, masyarakat dipandang sebagai pemain inti dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengunduhan hasil hingga evaluasi pengelolaan pariwisata sedangkan pihak swasta maupun pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator (Sanjaya, 2018). Ironisnya, realisasi atas tujuan mulia dari pariwisata berbasis kelompok ini seringkali tidak sesuai harapan karena beberapa sebab. Pertama, partisipasi warga dalam mengelola pariwisata berbasis kelompok masih rendah (Lutpi, 2016) dan kedua, keberadaan pariwisata berbasis kelompok kendatipun menyumbang manfaat bagi masyarakat tetapi tidak memberikan posisi tawar untuk masyarakat setempat (Harun 2011). Kedua permasalahan tersebut termasuk permasalahan kolektif masyarakat dalam mengelola pariwisata berbasis kelompok. Masalah kolektif dapat dicarikan solusi walau dengan modal ekonomi yang terbatas asalkan masyarakat mau bekerjasama. Sebelum memutuskan bekerjasama masyarakat pedesaan perlu menyadari bahwa mereka memiliki potensi berupa modal sosial yang tertanam dalam struktur sosialnya. Dengan memobilisasi modal sosial masalah pengelolaan pariwisata berbasis kelompok diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Asalkan aktor-aktor lokal mampu menjadi agen untuk bisa mengaktifkan modal sosial.

Pariwisata Berbasis Masyarakat atau *community based tourism (CBT)* telah menjadi kajian populer di kalangan ilmuan negara berkembang. Di Indonesia, tren kajian ini menjadi

primadona setelah Kementerian Pariwisata mencanangkan program unggulan “Visit Indonesia” yang dirintis sejak awal tahun 2000. Keterlekatan pariwisata dan masyarakat lokal di Indonesia sendiri secara historis tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tiga dimensi penting yang senantiasa menjadi perhatian utamanya adalah perihal partisipasi masyarakat, sistem kelembagaan dan infrastruktur.

Prafitri dan Damayanti (2016) mengulas kapasitas kelembagaan dalam pengembangan Desa Wisata Ketenger di Kabupaten Banyumas, dan menemukan bahwa sinergitas Dinas Pariwisata dan masyarakat mengalami kendala karena kapasitas sumber daya manusia yang minim. Sejalan dengan Prafitri dan Damayanti, penelitian Dewi, dkk (2013) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam model pengembangan Desa Wisata Jatiluwih di Kabupaten Tabanan Bali mengalami dominasi atas peranan pemerintah, sehingga bertentangan dengan pendekatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. Kendala dalam proses membangun kemitraan antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah secara politis juga akan berdampak pada sistem infrastruktur untuk PBM itu sendiri.

Satria (2009) menjelaskan bahwa peran pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem infrastruktur yang mapan masih mengalami kesenjangan secara signifikan, terutama pada kebutuhan dasar para wisatawan. Hal ini dijelaskannya pada upaya pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang.

Sejalan dengan paparan di atas,

pengelolaan pariwisata berbasis kelompok di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto mampu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui modal sosial kelompok di Taman Ghanjaran. Wisata Taman Ghanjaran dibangun di atas tanah bengkok pamong desa dan dikelola oleh BUMDes Desa Ketapanrame. Wisatawan yang datang tidak dipungut biaya masuk tetapi mereka cukup membayar retribusi parkir. Uniknya, meski Taman Ghanjaran hanya memiliki sumber pemasukan dari retribusi pembayaran parkir, Taman Ghanjaran mampu mengembangkan wisatanya dan menjadi wadah bagi warga baik secara perorangan maupun berkelompok. Biaya pengembangan untuk Taman Ghanjaran sendiri berasal dari investasi warga yang diwadahi dalam kelompok KUB.

Pemerintah desa sengaja tidak menerima investor dari luar yang bermodal besar karena berkeinginan lebih memberikan kesempatan kepada warga lokal untuk berinvestasi dengan konsep kewirausahaan sosial sehingga partisipasi aktif warga dapat dibangkitkan sekaligus mengentaskan kemiskinan secara gotong royong. Inovasi yang dilakukan pemerintah desa Desa Ketapanrame tidak lepas dari adanya aktor-aktor lokal yang mempunyai kapasitas menjadi agen penggerak pembangunan di desa yang nanti akan diidentifikasi melalui penelitian lapangan. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana pihak Pemerintah desa melakukan pengelolaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan keinginan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pengembangan wisata Taman Ghanjaran dengan sukarela, karena

kesukarelaan tersebut sebenarnya yang membuat keberhasilan konsep CBT dalam menaungi masyarakat dan kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut.

Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan partisipasi seperti apa yang terbentuk dalam kelompok KUB yang bermitra dengan Taman Ghanjaran yang berada dalam naungan BUMDes Ketapanrame. Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa dalam pembangunan dan pengembangan wisata Taman Ghanjaran memiliki campur tangan dari Kepala Desa Ketapanrame. Peneliti berasumsi bahwa, Kepala Desa memiliki andil yang cukup besar dalam proses mobilisasi warga untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Taman Ghanjaran. Oleh karena itu, penelitian ini selain untuk melihat model partisipasi yang dilakukan oleh warga Desa Ketapanrame, juga untuk mendeskripsikan pergerakan massa dalam prosesnya.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut (Denzin, 2009) kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitatif, jumlah, intensitas dan frekuensinya. Sedangkan untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu (Bugin, 2001). Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Meski begitu, peneliti tetap membutuhkan instrumen

bantuan untuk menggali informasi dari informan. Instrumen yang digunakan oleh peneliti antara lain adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi yang digunakan oleh peneliti merupakan observasi terstruktur, yaitu dalam proses wawancara, peneliti berkata terstruktur menyatakan sedang melakukan aktivitas penelitian. Hal ini dilakukan agar tidak ada kecanggungan antara peneliti dengan informan. Selanjutnya, wawancara. Wawancara yang digunakan oleh peneliti merupakan wawancara terbuka yaitu wawancara yang tidak tertulis secara sistematis. Tetapi peneliti tetap menggunakan *guide interview* untuk memandu pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Terakhir, instrumen dokumentasi. Hal ini dilakukan supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik. Alat yang digunakan untuk bantuan dokumentasi adalah *tape recorder* dan kamera.

Selain teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini juga menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan informan, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu pada penelitian ini adalah orang yang mengetahui potensi desa dan pengelolaan wisata di Taman Ghanjaran.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Desa Ketapanrame adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Mojokerto yang memiliki tempat wisata dengan menggunakan tanah kas desa (TKD) berupa tanah pertanian. Tempat wisata ini sudah diresmikan sejak tahun 2018 dengan pengelolaan dari masyarakat sendiri. Tempat wisata ini dinamakan

Taman Ghanjaran yang terletak tepat di depan Kantor Desa Ketapanrame. Awal mula Taman Ghanjaran dibentuk dari forum musyawarah antara Kepala Desa, BPD, Lembaga-lembaga yang ada di desa dan tokoh masyarakat.

Tanah kas desa yang dimiliki merupakan jenis tanah yang tidak dapat menahan air. Jika akan dialiri air sebanyak apapun maka tanah tersebut akan cepat meresap sehingga memberikan dampak pada biaya yang tinggi jika akan digunakan untuk pertanian. Dengan keadaan geografis yang seperti itu, pihak pemerintah desa mencetuskan untuk membuat taman tanpa mengubah fungsi tanah sebagai tanah peresapan air. Konsep dari pembuatan Taman Ghanjaran ini termasuk pada konsep CBT (*Community Based Tourisme*) yang mana mengambil hubungan dengan kelompok lokal dan pariwisata sebagai premis utama untuk analisis (Blackstock, 2005). Melihat lebih jauh tentang Taman Ghanjaran tidak mengubah lingkungan terutama fungsi tanah sebagai tanah resapan. Hal ini sesuai dengan pernyataan (UNEP dan WTO 2005; Suansri 2003; Brohman, 1996 dalam Pakpahan, 2018) bahwa CBT sangat tergantung pada konservasi alam dan maupun mencegah degradasi lingkungan. Salah satu contoh destinasi wisata yang mengimplementasikan konsep CBT secara nyata adalah Taman Ghanjaran yang berada di Desa Ketapanrame. Terdapat dua kelompok yang menonjol dalam proses pengembangan Taman Ghanjaran hingga menjadi besar seperti saat ini. Kedua kelompok tersebut yaitu BUMDes dan KUB. Untuk menjelaskan lebih detail mengenai bentuk partisipasi dalam kelompok KUB karena KUB bermitra dengan Taman Ghanjaran yang berada dalam

naungan BUMDes Ketapanrame.

### **BUMDes Ketapanrame**

Proses terbentuknya BUMDes Ketapanrame diawali dengan adanya program air bersih oleh pemerintah pada tahun 1978. Melalui tim pembangunan kecamatan, dibangunlah sarana air bersih berupa pemasangan pipa dan pembuatan bak penampungan air. Pada tahun 1988 dibentuklah sebuah badan usaha masyarakat yang bernama HIPAM “Tirto Tentrem” dengan tujuan supaya pengelolaan dan pendistribusian air ke masyarakat dapat dikelola dengan baik dan secara merata. Tahun 2001 terbentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan nama BPAM “Tirto Tentrem” yang hanya fokus pada pendistribusian air ke masyarakat. Pada tahun 2010 terjadi perubahan, BUMDes BPAM “Tirto Tentrem” menjadi BUMDes Ketapanrame dengan penambahan tiga unit usaha baru sehingga menjadi empat unit usaha yaitu: 1) Pengelolaan air, 2) Pengelolaan kebersihan lingkungan, 3) Pengelolaan kios dan stand, dan 4) Pengelolaan air tangka. Pada tahun 2016 terjadi pengembangan pada unit usaha kios dan stand menjadi unit usaha wisata dan unit usaha kios dan ternak terpadu. Pada tahun 2019, masuklah program jalin mitra Provinsi Jawa Timur untuk Desa Ketapanrame dengan penyertaan modal kepada BUMDes sehingga BUMDes melakukan perubahan dan penyesuaian di unit usaha masing-masing. Total unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Ketapanrame berjumlah 6 unit usaha yaitu: 1) Pengelolaan air minum, 2) Pengelolaan air tangka, 3) Pengelolaan kebersihan lingkungan, 4) Pengelolaan kios dan kandang ternak terpadu, 5) Pengelolaan wisata desa, dan 6) Pengelolaan simpan pinjam.

Secara struktural, BUMDes dikelola oleh 1 ketua, 2 staf administrasi dan bendara, dan 4 pengawas. Pengurus BUMDes ini dipilih secara musyawarah dengan masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih kembali di periode berikutnya. Sedangkan untuk pengurus unit-unit usaha, masing-masing dikelola oleh ketua unit (manager). Ketua unit dan stafnya dihitung sebagai karyawan dengan masa bakti sampai usia 65 tahun. Karyawan dapat dipilih berdasarkan penunjukkan dari Kepala Desa atau ketua unit. Langkah gerak masing-masing unit usaha telah ditetapkan sebagaimana yang tertera pada peraturan Desa Ketapanrame, yaitu:

- a) Pengelolaan air minum yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih untuk kebutuhan air minum masyarakat, kawasan pervilaan dan hotel. Sumber air didapatkan dari mata air di wilayah perhutani dan Tanah Kas Desa (TKD)
- b) Pengelolaan kebersihan lingkungan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah desa serta pemilahan sampah melalui Bank Sampah Desa
- c) Pengelolaan kios dan ternak terpadu yang bergerak di bidang pengelolaan kios/stand yang berada di lahan TKD yang dipergunakan untuk usaha perdagangan dan kandang ternak terpadu
- d) Pengelolaan tandon air tangka yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk truk tangka yang akan dikirim ke konsumen luar daerah
- e) Pengelolaan wisata yang bergerak di bidang pengelolaan aset desa yang berpotensi untuk dijadikan wisata dengan kegiatan dan usaha

sebagai berikut: pengelolaan pujasera, kerjasama wahana, pengelolaan parkir, pengelolaan kamar kecil, paket edukasi pertanian dan *outbound*

- f) Pengelolaan simpan-pinjam yang bergerak di bidang permodalan bagi UMKM warga desa

Setelah dibentuknya unit-unit usaha BUMDes tersebut, manfaat yang didapatkan oleh desa adalah bertambahnya jumlah PAD desa, pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum yang terlayani dengan baik, kebersihan lingkungan yang terjaga, dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha di masyarakat. Selain itu, karena unit-unit ini dikelola secara mandiri oleh warga Desa Ketapanrame, maka terdapat beberapa kemudahan yang diperoleh oleh warga secara langsung. Beberapa kemudahan tersebut diutarakan oleh ketua BUMDes, Bapak Heriyanto, sebagai berikut:

“Warga desa kita itu sudah sangat dimanja dengan fasilitas-fasilitas dan kemudahan seperti membayar air yang hanya ditarik 3000/bulan, kebersihan sampah 6000/bulan. Kalau diluar mungkin untuk air mereka bisa menghabiskan 20.000/bulan, pengambilan sampah 8x pengambilan membayar 8000/pengambilan. Jadi kalau dihitung-hitung peneliti membantu mereka berhemat cukup banyak dalam pengeluaran mereka. dan sekarang ditambah dengan fasilitas tiket gratis masuk ke kolam di Taman Ghanjaran. Peneliti menyediakan tiket gratis untuk mereka” (*sumber: wawancara Bapak Heriyanto tanggal 23 Juli 2020*)

Dari wawancara tersebut, manfaat

utama yang diberikan oleh BUMDes adalah dengan membantu masyarakat menghemat pengeluaran dan juga membantu masyarakat dalam hal kreativitas usaha dengan bantuan terbukanya daya saing setelah Taman Ghanjaran dibangun.

### Taman Ghanjaran

Taman Ghanjaran menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Ketapanrame, Mojokerto, yang telah diresmikan pada bulan November tahun 2018 lalu. Sejak diresmikan pada akhir tahun 2018, Taman Ghanjaran telah banyak menyita perhatian wisatawan. Tempatnya yang nyaman dengan fasilitas yang sangat baik, membuat Taman Ghanjaran menjadi salah satu tujuan wisatawan menghabiskan waktu bersama teman, kekasih bahkan keluarga. Kita dapat menghabiskan waktu dengan menikmati senja, menunggu matahari tenggelam dibalik Gunung Penanggungan yang terlihat jelas dari Taman Ghanjaran. Selain taman, Taman Ghanjaran memiliki fasilitas lain berupa wahana permainan dan pujasera. Terdapat juga wahana permainan anak-anak di dalam taman dengan dilengkapi *gazebo* sebagai tempat meneduh. Kursi dan rumput-rumput di dalam tanam, sesuai untuk anak-anak muda dan keluarga untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga tercinta.

Ide awal dibangunnya Taman Ghanjaran dicetuskan oleh Kepala Desa Ketapanrame, Zainul Arifin. Ide ini terlintas ketika beliau bermaksud untuk memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) yang telah dibiarkan tanpa diolah selama tiga tahun. Beliau memperkirakan apabila tanah tersebut diolah menjadi lahan pertanian, keuntungan yang dihasilkan tidak

seberapa dan juga tidak dapat membantu pembangunan desa karena hasilnya hanya akan menjadi hak aparat desa. Oleh karena itu, beliau lantas mengutarakan keinginan beliau untuk membangun sebuah wisata kepada masyarakat dan BPD ketika pertemuan tahunan. BPD menyetujui usul tersebut asalkan dari pihak desa membuat peraturan mengenai perubahan lahan TKD menjadi lahan wisata. Dari pembicaraan tersebut, dilakukanlah musyawarah untuk menentukan jenis wisata seperti apa yang akan dibangun karena menurut tata kelola lahan Mojokerto, Desa Ketapanrame termasuk lahan kuning atau tanah resapan. Pihak desa menginginkan membangun wisata, tetapi tidak mengabaikan fungsi wilayahnya sebagai lahan resapan. Oleh karena itu, dicetuskanlah untuk membangun taman. Hal ini didapatkan sesuai informasi dari Bapak Heriyanto selaku Kepala BUMDes dalam wawancara sebagai berikut:

“.... Hanya, wilayah kita ini di Mojokerto bukan berada di zona hijau tapi zona kuning, tanah peresapan. Jadi ide yang muncul ketika akan membangun wisata ya taman. Logikanya, dengan membangun taman, kita tidak menyalahi aturan tata penggunaan lahan dan masih berfungsi sebagai lahan resapan air” (*sumber: wawancara Bapak Heriyanto tanggal 23 Juli 2020*)

Setelah proses musyawarah tersebut, maka selanjutnya disusun proposal untuk bantuan anggaran pembangunan. Pada bulan Maret 2018, dimulailah awal pembangunan taman dan selesai di bulan September 2018. Begitu pembangunan selesai, taman tidak lantas langsung diresmikan karena

terdapat beberapa kendala sehingga baru bisa diresmikan pada bulan Desember bersama Bupati. Setelah peresmian kemudian dari pihak desa menyerahkan pengelolaan Taman Ghanjaran kepada BUMDes di bawah naungan Unit Wisata untuk dikelola lebih baik.

Taman Ghanjaran memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap perekonomian warga Desa Ketapanrame. Hal ini dapat dilihat, di dalam Taman Ghanjaran tidak hanya terdapat struktur aparat desa yang tergabung tetapi juga warga. Sebagian besar warga ikut bergabung meriahkan Taman Ghanjaran, sebagian sebagai pedagang sebagian lagi sebagai karyawan. Pemerintah desa memang membuat aturan khusus, bahwa pekerja yang berada di Taman Ghanjaran harus berasal dari warga Desa Ketapanrame sendiri. Kalaupun ada orang luar, tidak boleh lebih dari lima orang. Tujuan dari adanya orang luar ini supaya warga dapat belajar kreativitas yang dimiliki oleh orang luar daerah tersebut.

Selain untuk memberikan ruang wisata kepada wisatawan dan warga, memanfaatkan lahan TKD yang kurang produktif, juga membantu warga mencoba pekerjaan baru yaitu investasi. Wahana yang terdapat di Taman Ghanjaran merupakan hasil dari investasi warga yang diprakarsai oleh warga sendiri. Kelompok investasi tersebut disebut juga dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang mana pengelolaannya dilakukan oleh warga sendiri. KUB merupakan satu-satunya kelompok mitra yang bekerja sama dengan BUMDes.

#### **Kelompok Usaha Bersama (KUB)**

Taman Ghanjaran merupakan bagian dari BUMDes Desa Ketapanrame yang

mana di dalam Taman Ghanjaran terdapat sebuah kelompok bernama KUB (Kelompok Usaha Bersama). Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan wadah bagi warga yang ingin berinvestasi di Taman Ghanjaran, yang mana hasil investasi tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk wahana KUB di dalam Taman Ghanjaran. Awal mula KUB dimulai dari program kampanye ketika pemilihan Kepala Desa Ketapanrame. Pada saat itu, Taman Ghanjaran sudah berdiri, dan kepala desa yang saat ini menjabat yang mana beliaulah yang memasukkan program investasi warga pada saat kampanye pemilihan kepala desa. Dan ketika beliau terpilih kembali menjadi Kepala Desa Ketapanrame, maka program tersebut direalisasikan menjadi KUB. Kelompok Usaha Bersama (KUB) dikelola oleh warga sendiri tanpa campur tangan dari Pemerintah Desa. Anggota yang bergabung dalam kelompok KUB merupakan warga Ketapanrame yang ikut berinvestasi di dalam kelompok tersebut, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ketua KUB, Khusnul Yaqin, dalam wawancaranya:

“KUB merupakan Kelompok Usaha Bersama yang mana anggotanya merupakan warga asli Desa Ketapanrame. Harus warga Desa Ketapanrame. Pengurusnya merupakan salah satu penanam saham juga. Dipilih oleh warga pemilik saham melalui forum musyawarah”  
(sumber: wawancara Bapak Khusnul Yaqin tanggal 23 Juli 2020)

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa yang menjadi investor merupakan warga asli Desa Ketapanrame. Sedangkan pengurusnya merupakan pemilik saham yang berasal

dari warga sendiri. Saham KUB berada di harga Rp.1.000.000/saham dengan maksimal kepemilikan saham sebanyak 10 saham/KK. Total saham yang dimiliki KUB saat ini sebanyak 3.700 saham dengan jumlah KK yang ikut berpartisipasi sebanyak 650 KK. Meskipun KUB diolah oleh warga Desa Ketapanrame secara berkelompok, KUB tetap memiliki tanggung jawab terhadap BUMDes dan Pemerintah Desa. Bentuk tanggung jawab tersebut ialah pembayaran sharing sebesar 10% dari pendapatan kotor kepada BUMDes dan laporan pendapatan harian kepada anggota. Sedangkan untuk kepala desa sendiri hanya sekedar mengetahui tanpa campur tangan dalam pengelolaannya. Baik operasional maupun manajerial, KUB dikelola sepenuhnya oleh warga.

Awal terbentuknya KUB adalah merupakan salah satu program kampanye Kepala Desa yang saat ini menjabat pada masa pencalonan. Dibentuknya kelompok tersebut untuk meningkatkan perekonomian warga desa sehingga yang diperbolehkan untuk investasi ke Taman Ghanjaran adalah warga asli Desa Ketapanrame. Sebelum KUB dibentuk, bahkan pada awal masa pembangunan Taman Ghanjaran, warga sebenarnya tidak tertarik dengan dibangunnya taman karena dalam bayangan mereka taman ini hanya akan menjadi taman alun-alun seperti biasanya. Hal ini cenderung membuat merek mengabaikan. Hal ini yang menjadi kekhawatiran bagi kepala desa, yaitu keacuhan warganya sendiri. Padahal pembangunan wisata diperuntukkan bagi mereka.

Pemerintah desa yang menginginkan warganya untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan taman, mencoba melakukan sesuatu

supaya warganya tertarik bergabung dalam Taman Ghanjaran. Maka, di awal pembukaan Taman Ghanjaran, Pemerintah desa bekerjasama dengan sebuah CV yang menaungi kelompok pasar malam di Mojokerto untuk ikut serta dalam pembukaan taman.

Selama tiga hari tiga malam, pengunjung taman terus berdatangan bahkan semakin meningkat dari hari ke harinya. Tidak hanya oleh warga setempat tapi juga oleh warga desa sekitar Desa Ketapanrame. Sehingga keramaian tersebut hampir tidak pernah sepi dan menarik perhatian warga. Setelah kerja sama dengan pasar malam selesai, warga kemudian meminta izin kepada pihak desa untuk diperbolehkan menempati kios-kios yang ada di depan taman. Pihak desa memperbolehkan, dan tidak hanya itu, warga juga dibangun pujasera di dalam taman untuk mempermudah mereka berinteraksi dan mempromosikan dagangannya dengan pengunjung taman. Selain warga yang berminat untuk menjadi penjual, terdapat beberapa kelompok warga yang iuran dan membeli seperangkat alat permainan untuk disewakan kepada pengunjung taman. Kelompok ini ada yang bertempat di dalam dan di luar taman.

Dari kondisi seperti inilah kemudian Kepala desa memiliki ide untuk membuat sebuah program investasi bagi warganya. Supaya kelompok-kelompok tersebut memiliki satu wadah yang terorganisir dan juga sebagai salah satu solusi untuk mengurangi jumlah kelompok yang kemungkinan akan terus bertambah. Tetapi karena masa jabatan beliau sudah habis, akhirnya beliau memasukkan program tersebut dalam kampanye ketika beliau mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa.

Hingga akhirnya program tersebut direalisasikan pada saat beliau terpilih kembali menjadi kepala desa. Sebelum membentuk kelompok yang akan mewadahi program tersebut, kepala desa mendiskusikan hal tersebut dengan pihak BUMDes dan warga. Pihak desa lalu menawarkan kepada warga yang mau berinvestasi di Taman Ghanjaran, dan hasilnya terdapat banyak sekali warga yang ingin menginvestasikan uangnya. Selain tujuan ekonomi juga untuk membantu dalam proses pengembangan taman.

Kemauan warga desa untuk berinvestasi di Taman Ghanjaran karena melihat taman tersebut ramai dan digemari oleh masyarakat sekitar, dan dengan kondisi yang usaha warga yang tidak terorganisir dengan baik maka pihak desa membantu warga dengan membentuk wadah kelompok. Akhirnya Kepala Desa membentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang mana warga desa dapat membeli saham seharga Rp.1.000.000,-/saham/KK maksimal 1 KK memiliki 10 saham. Sampai saat ini terdapat 3.700 saham dengan 650 KK yang berpartisipasi, sedangkan total KK di Desa Ketapanrame sebanyak 1800 KK.

Ada beberapa perhitungan yang harus dibayarkan oleh KUB kepada BUMDes dan operasional KUB. Berikut pernyataan dari Kepala Desa Ketapanrame.

“Dari 100% pendapatan kotor, maksimal 35% untuk operasionalnya mereka. 10% kontribusi untuk sharing BUMDes. Cadangan, bantuan sosial masyarakat, dan pengembangan dicanangkan sebesar 15%. Nah, sisanya ada 40% itulah SHU yang akan dibagikan. Jadi, misalkan seperti ini, pendapatan KUB ada

100.000.000. 35% digunakan untuk operasional sebesar 35.000.000, 10% untuk sharing BUMDes sebesar 10.000.000. Jadi sisanya ada 50.000.000, 10% nya digunakan untuk dana sosial, cadangan, dan pengembang usaha, jadi total sisanya ada 40.000.000. Nah, 40.000.000 ini nanti yang dibagikan sejumlah saham. Misalkan kita memiliki 1000 saham, dan dimiliki oleh 500 orang. Berarti 40.000.000 itu dibagi dengan 1000 saham, hasilnya tiap satu saham berhak mendapatkan 40.000/saham.”  
(sumber: wawancara Bapak Kepala Desa Ketapanrame tanggal 23 Juli 2020)

Dari pernyataan Kepala Desa Ketapanrame dapat dilihat bahwa investasi dari warga desa ke Taman Ghanjaran tidak terbuang sia-sia. Mereka mendapatkan pengembalian uang dari uang mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa Taman Ghanjaran dari warga untuk warga Desa Ketapanrame. Selain tempat permainan, tempat parkir dikelola oleh Karang Taruna di desa tersebut. Yang mana di Bulan Juni terdapat sepeda motor parkir sejumlah 6.322 sepeda motor dengan parkir Rp 2.000/motor jadi total pemasukan dari parkir sepeda motor Rp 12.644.000,-, sedangkan mobil parkir sejumlah 4.162 mobil dengan parkir Rp 6.000/mobil jadi total pemasukan dari parkir mobil Rp 24.972.000,-.

Selain tempat – tempat permainan, tempat parkir, Taman Ghanjaran juga menyewakan stand untuk berjualan sebanyak 97 stand dan yang aktif di bulan Juni sebanyak 94 stand. Setiap penyewa dikenakan biaya Rp 200.000,-/stand/bulan. Jadi pendapatan di Bulan Juni dari stand sejumlah Rp

18.800.000,-. Semua sektor yang ada di Taman Ghanjaran dikelola oleh warga Desa Ketapanrame. Dapat dikatakan adanya partisipasi aktif dari warga untuk menjalankan roda pariwisata desa. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata di Desa Ketapanrame merupakan *Community Based Tourisme* karena salah satu dari aspek CBT telah dipenuhi oleh mereka yaitu partisipasi aktif dari kelompok. Selain itu juga sesuai dengan pernyataan dari Suansri (2003) yang mengatakan bahwa CBT tidak mengutamakan keuntungan bagi investor, melainkan mengutamakan pada kebermanfaatan pengelolaan pariwisata pada kelompok lokal (masyarakat).

Taman Ghanjaran menjadi contoh nyata keberhasilan pengembangan CBT yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur. Dalam Taman Ghanjaran, masyarakat berperan aktif dalam setiap aspek pengembangan wisata yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes Ketapanrame. Bagaimana konsep CBT yang ada pada Taman Ghanjaran akan sesuai dengan konsep CBT yang dikemukakan oleh Suansri (2003), yaitu harus memenuhi sepuluh prinsip utama CBT yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Secara garis besar sepuluh prinsip CBT tersebut dapat dirangkum menjadi lima yaitu: *pertama*, membantu pengembangan kelompok lokal. Dalam hal ini, dengan dibangunnya Taman Ghanjaran telah memunculkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengembangan wisata taman. Buktinya adalah dengan terbentuknya KUB sebagai wadah investasi warga dalam bentuk saham. Terdapat juga kelompok masyarakat yang awalnya tidak terlihat, mulai muncul ke permukaan ketika Taman Ghanjaran ini

dibangun, yaitu kelompok pengamen jalanan. Selain itu, dengan adanya Taman Ghanjaran, kelompok-kelompok kecil yang ada di Desa Ketapanrame ikut terbantu dalam hal finansial karena dapat mempromosikan kelompok sekaligus produk kelompok tersebut. seperti yang dijelaskan oleh ketua BUMDes Ketapanrame:

“Untuk yang mengatur parkir itu, sejak awal sudah kami serahkan kepada Karang Taruna. Jadi, yang jaga di parkir itu, bukan atas nama kelompok Karang Taruna karena penghasilan mereka tidak masuk ke Karang Taruna, tetapi secara personal. Kelompok PKK juga begitu. Beberapa yang jadi penjual di pujasera itu juga merupakan anggota PKK, tetapi mereka berdagang secara personal bukan secara kelompok. Sebenarnya, kami telah menyediakan kios khusus baik untuk PKK maupun Karang Taruna. Selain itu juga, kami bekerjasama dengan unit-unit lain yaitu Unit Pengelolaan Air, Unit Kebersihan Lingkungan, dan Unit Urusan Kios.” (*sumber: transkrip wawancara Ketua BUMDes Ketapanrame, 23 Juli 2020*)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya Taman Ghanjaran selain membantu kelompok-kelompok yang sudah ada juga memunculkan kelompok baru yang berupa KUB.

*Kedua*, meningkatkan kualitas hidup. Artinya, pariwisata tersebut selain membantu dalam pengembangan wisata dan kelompok lokal, pariwisata tersebut juga harus memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Setelah pembangunan Taman Ghanjaran,

warga desa banyak yang ikut andil dalam proses pengembangan wisata Taman Ghanjaran. Salah satunya adalah dengan adanya KUB dan pujasera. Dalam KUB, warga diberikan kesempatan untuk berinvestasi dalam bentuk saham. Sedangkan dalam pujasera, warga diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya melalui stand-stand yang disediakan oleh pihak pengelola yang tak lain adalah BUMDes Ketapanrame. Melalui dua wadah tersebut, Taman Ghanjaran membantu meningkatkan kualitas hidup warga Ketapanrame. selain itu, terdapat hasil yang didapatkan oleh Taman Ghanjaran secara khusus dianggarkan untuk kepentingan bersama warga sebagaimana yang telah dijelaskan pada wawancara berikut:

“..... Akhir tahun kemarin (2019), kami menyisihkan 5% dari SHU yang kami terima sebesar 60.000.000 dari total 1.200.000.000 untuk dibagikan kepada masyarakat dengan kategori tertentu karena kita tidak bisa membantu mereka semua” (sumber: *transkrip wawancara Ketua BUMDes Ketapanrame, 23 Juli 2020*)

*Ketiga*, yaitu pelestarian lingkungan yang dapat dilihat dengan penggunaan lahan yang tetap mementingkan fungsi utama dari lahan yang digunakan untuk pembangunan taman. Pada awalnya, lahan tersebut merupakan lahan kosong yang tidak ditanami apapun. Tetapi setelah pengalihan fungsi lahan, lahan tersebut diubah menjadi taman yang mana taman tersebut ditanami berbagai tanaman yang membantu meningkatkan kebermanfaatan dari lahan tersebut. Hal ini juga telah dijelaskan dalam wawancara berikut:

“Hanya, wilayah kita ini di Mojokerto bukan berada di zona hijau tapi zona kuning, tanah peresapan. Jadi ide yang muncul ketika akan membangun wisata ya taman. Logikanya, dengan membangun taman, kita tidak menyalahi aturan tata penggunaan lahan dan masih berfungsi sebagai lahan resapan air” (sumber: *transkrip wawancara Ketua BUMDes Ketapanrame, 23 Juli 2020*)

Dari pernyataan tersebut, pengalihan fungsi lahan yang terjadi di Desa Ketapanrame sejalan dengan peraturan penggunaan fungsi lahan yang terdapat di Kabupaten Mojokerto, yaitu sebagai zona kuning atau tanah peresapan air. Sehingga dengan dialih fungsikan tanah TKD tersebut menjadi taman tidak menyalahi aturan tata penggunaan lahan yang telah ditetapkan atas tanah Desa Ketapanrame. Dengan dipilihnya bentuk taman sebagai peralihan lahan, terdapat beberapa kebermanfaatan yang didapatkan diantaranya meningkatkan kualitas tanah dan kuantitas oksigen, sebagai tempat hiburan dan atau wisata murah masyarakat sekitarnya, dan sebagai tempat edukasi pengembangan kelompok lokal warga.

*Keempat*, mendukung pembelajaran lintas budaya. Taman Ghanjaran tidak hanya dikunjungi oleh warga lokal melainkan juga warga perkotaan yang berada di sekitar Desa Ketapanrame. Dari kunjungan-kunjungan tersebut sangat memungkinkan untuk bertukarnya pengetahuan antara warga lokal dengan pengunjung. Apalagi dari pihak pengelola juga tidak membatasi interaksi diantara keduanya. Contoh nyata adalah bentuk sharing pengetahuan antara penjual yang ada di

sekitar Taman Ghanjaran. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Herwanto sebagai berikut:

“Sebagian besar warga masuk ke sektor perdagangan. Kios yang ada di Taman Ghanjaran, kurang lebih ada 100 kios, yang ngisi warga Ketapanrame semua. Yang warga luar itu hanya ada 4 orang. Asumsi kami memasukkan warga luar adalah agar warga kita dapat belajar dari mereka bagaimana cara membuat makanan-makanan yang ada sekarang. Awalnya, warga kita itu tidak bisa apa-apa mbak, lambat laun mereka mulai belajar dari yang warga luar itu yang sudah berpengalaman”  
(*sumber: transkrip wawancara Ketua BUMDes Ketapanrame, 23 Juli 2020*)

Dari potongan wawancara tersebut, diketahui bahwa pihak pengelola justru sengaja memberikan kesempatan kepada penjual yang berasal dari luar Desa Ketapanrame dengan maksud supaya warganya dapat belajar cara pembuatan jajanan sekaligus cara mempromosikannya. Meskipun jumlah penjual dari luar desa dibatasi, tidak menutup kemungkinan sharing pengetahuan tersebut akan mengalami perkembangan seiring berkembangnya Taman Ghanjaran. Selain dari sisi penjual, melalui Taman Ghanjaran warga juga belajar cara mengelola kelompok dengan baik dan juga mendapatkan pengetahuan baru berupa investasi saham yang dikelola oleh kelompok warga sendiri yaitu KUB.

*Kelima*, pendistribusian manfaat (hasil) secara adil dan merata. Dalam pengelolaan Taman Ghanjaran, terdapat beberapa sharing yang harus dibayarkan oleh kelompok dan warga yang ikut tergabung di dalamnya. Sharing akan dikelola oleh BUMDes

Ketapanrame yang merupakan pihak lembaga yang menaungi unit yang mengelola Taman Ghanjaran. Sharing tersebut akan dikurangi dengan berbagai kebutuhan kelompok sehingga sisanya menjadi penghasilan bersih BUMDes atau Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU akan didistribusikan kembali kepada warga dan pengembangan kelompok-kelompok yang ada di Desa Ketapanrame. Untuk lebih jelas mengenai penggunaan sharing tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1 Persentase pembagian SHU BUMDes Ketapanrame

No	Kegunaan	Persentase Pembagian SHU
1	PAD Desa Ketapanrame	Mak 20%
2	Operasional Kelembagaan BUMDes 1 tahun berikutnya	Mak 25%
3	Dana cadangan BUMDes	10%
4	Modal pengembangan usaha	40%
5	Sosial masyarakat	5% - 10%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Pengelola wisata Taman Ghanjaran tidak serta merta hanya membuat taman namun mereka juga memberikan kenyamanan bagi para wisatawan. Ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Taman Ghanjaran. Untuk menikmati wahana permainan di area permainan wisatawan harus membayar tiket sebesar Rp 5.000,-/orang. Jika wisatawan ingin bermain wahana permainan maka wisatawan harus membayar lagi. Ada beberapa wahana yang menjadi favorit wisatawan yaitu sepeda udara dengan tiket sebesar Rp. 30.000,-/sepeda. Selain wahana permainan, pengelola juga menyediakan fasilitas panggung hiburan yang mana diisi oleh warga atau pengamen yang berasal dari Desa

Ketapanrame.

Dengan kata lain, dengan dibangunnya Taman Ghanjaran, pemerintah desa telah berhasil membangun potensi-potensi terpendam yang dimiliki warganya. Tidak hanya berhasil meningkatkan taraf hidup, tetapi juga berhasil meningkatkan kesadaran warganya akan pentingnya sebuah kelompok yang berfungsi mewadahi aspirasi-aspirasi mereka. Selain itu, pemerintah desa juga mampu membangun budaya baru bagi warganya berupa investasi saham, yang mana hal ini merupakan hal yang sangat penting pada masa seperti saat ini.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pembangunan wisata yang berbasis CBT atau wisata yang bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat lokal membutuhkan stimulan-stimulan yang dapat menarik minat partisipasi warga. Dalam kasus CBT di Taman Ghanjaran, pemberi stimulant berasal dari pihak pemerintah desa. Stimulan yang diberikan berupa adanya Kerjasama dengan CV Pasar Malam yang ada di Kota Mojokerto. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat warga untuk bergabung dalam proses pengembangan Taman Ghanjaran. Target pihak desa selanjutnya adalah partisipasi warga dengan cara investasi saham. Partisipasi investasi saham ini diwadahi dalam sebuah kelompok bernama KUB (Kelompok Usaha Bersama) dimana kelompok ini merupakan kelompok yang diolah oleh warga sendiri. KUB merupakan mitra satu-satunya yang bekerja sama dengan BUMdes, dan hanya perlu

mempertanggungjawabkan segala tindakan atau kebijakan yang diambil kepada warga pemilik saham.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk partisipasi kelompok masyarakat dengan menggunakan konsep CBT dalam pengelolaan wisata Taman Ghanjaran. Partisipasi yang dibangun dalam Taman Ghanjaran adalah partisipasi warga dalam bentuk investasi. Selain itu, warga juga diberikan pengetahuan baru bagaimana cara membangun dan mengembangkan suatu kelompok supaya tidak mudah hilang eksistensinya. Dari penelitian, penemuan yang ditemukan oleh peneliti adalah, bahwa dalam pengimplementasian konsep CBT ke dalam sebuah pengembangan wisata diperlukan modal sosial atau paling tidak kepercayaan yang kuat antara si pengembang dengan warga. Modal kepercayaan yang dimiliki oleh pengembang akan memudahkan dalam memobilisasi massa untuk mengikuti petunjuk dan arahnya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pengembang atau *investor* dalam pembangunan wisata pada umumnya bukan merupakan anggota dari warga lokal. Hal ini justru menjadi salah satu penyebab pengembangan wisata tersebut seringkali menimbulkan masalah baik secara sosial maupun lingkungan.

##### **Rekomendasi/Saran**

Saran yang diberikan oleh penulisan dalam tulisan ini adalah perlu adanya metode penelitian kuantitatif untuk mengukur keberhasilan pengelolaan wisata berbasis komunitas. Hal ini dapat menjadi masukan untuk pengelola wisata dalam memajukan wisata tersebut demi kenyamanan pengunjung.

**DAFTAR PUSTAKA****Jurnal**

Blackstock, Kirsty. 2005. A critical look at community based tourism. *Community Development Journal* Vol 40 No 1

Pakpahan, R. (2018).

IMPLEMENTASI PRINSIP  
PARIWISATA. *JUMPA*, 05,  
147.

Harun, Z. 2014. Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui

PengembanganPariwisata Yang Berbasis Kelompok Lokal: Kasus di Kota Padang Panjang. *Jantro: Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya* Vol 16 No. 1, hlm 99-106

Lutpi, H. 2016. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai di Kecamatan Jerowaru. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi* Vol 8 No. 3, hlm 1-10

Pafitri, G.R dan Maya D. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Ketenger Banyumas. *Jurnal Pengembangan*

Pakpahan, Rosdiana. 2018. Implementasi prinsip pariwisata berbasis kelompok di Desa Wisata Nglinggo Yogyakarta. *JUMPA*. Volume 05, Nomor 01, Juli 2018

Sanjaya, R.B. 2018. Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kemetul Kabupaten Semarang. *JUMPA* Vol 5 No. 1, hlm 91-110.

Satria, D. (2009). Strategi Pengembangan Ekowisata

Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Applied Economics*, Vol. 3 (1). Hal 37-47

**Buku-buku**

Denzin, N. K. 2009. *Handbook of Qualitative Research Second Edition*.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya; Bandung.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: Responsible Ecological Social Tour-REST.